



SATU TAHUN BEROPERASI

MPP Kota Yogyakarta Integrasikan 103 Pelayanan

YOGYA (MERAPI) - Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Yogyakarta telah mengintegrasikan 103 pelayanan yang terdiri atas 98 pelayanan perizinan dan non perizinan serta 95 layanan nonperizinan dari lembaga vertikal sejak setahun beroperasi. Layanan yang paling banyak diakses masyarakat di antaranya administrasi kependudukan, perpajakan dan jaminan kesehatan daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Budi Santosa mengutarakan, untuk perizinan kewenangan Pemkot Yogyakarta, sampai September 2023, MPP Kota Yogyakarta sudah melayani layanan perizinan dan nonperizinan sebanyak 11.947.

Sedangkan pengunjung MPP Kota Yogyakarta selama tahun 2022 sekitar 139.000 dan tahun 2023 sampai September sekitar 82.150. Layanan favorit (yang banyak diakses) adalah layanan perizinan dan nonperizinan. Kita patut bersyukur bahwa layanan ini diakses sebagai pelayanan dasar oleh masyarakat, papar Budi saat seminar implementasi

MPP Kota Yogyakarta, di Hotel Cavinton, Rabu (4/10).

Budi menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan, MPP Kota Yogyakarta menyediakan layanan tanggapan dari masyarakat dengan berbagai saluran. Berdasarkan tanggapan yang masuk dari masyarakat sekitar 60 persen berkaitan dengan proses, alur dan perizinan persyaratan, 30 persen pengaduan proses perizinan dan 10 persen terkait sistem dan prasyarat.

"Sehingga dilihat dari hal tersebut kita akan ada penguatan ke sana dengan berbagai macam yang harus kita laksanakan. Apa yang dikeluhkan masyarakat dan laporan dari masyarakat jadi pemacu untuk lebih baik," ujarnya.

Menurut Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo,

MPP harus mengedepankan prinsip faster (cepat), better (lebih baik), cheaper (lebih murah). Hal itu sesuai dengan semangat keberadaan MPP untuk memberikan kemudahan, efisiensi dan kecepatan. Pelayanan publik disatukan dalam satu tempat MPP agar lebih masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengakses pelayanan publik.

"Dilihat dari sisi kesiapan SDM, infrastruktur dan ekosistem yang ada di dalamnya (MPP) harus menunjang pelayanan publik supaya lebih baik. Pelayanan cheaper berarti harus memangkas beberapa biaya. Jadi faster, better dan cheaper," kata Singgih.

Singgih menyatakan untuk menuju ketiga hal itu yaitu faster, better dan cheaper diperlukan adaptasi, inovasi dan kolaborasi. Dicontohkan beberapa hal yang perlu adaptasi terkait perilaku masyarakat dan regulasi. Kegiatan seminar dengan mengumpulkan para tenant dan pemangku kepentingan di MPP di Kota Yogyakarta itu juga sebagai bentuk kolaborasi.

"Saya mengapresiasi (MPP Kota Yogyakarta) walaupun usianya baru satu tahun, tapi MPP



MERAPI-DISKOMINFO SAN KOTA YOGYAKARTA
 Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo saat membuka kegiatan seminar implementasi MPP Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta sudah punya prestasi untuk menghadirkan sebuah layanan publik yang lebih baik lagi. Saya berharap ini akan terus dikembangkan dan semoga bisa menjadi pelayanan publik terbaik sehingga masyarakat Yogya terbantu," terangnya.

Pihaknya juga berharap melalui seminar itu dapat menjadi ruang untuk saling berbagi agar pelayanan di MPP menjadi lebih baik. Singgih menuturkan saat awal meninjau MPP Kota Yogya-

kota pihaknya kaget karena menyediakan pelayanan pernikahan dari penghulu, tempat akad nikah sampai tempat pelaminan. Selain itu, layanan MPP Kota Yogyakarta tidak hanya hadir secara offline. Tapi juga hadir secara online baik melalui website maupun Jogja Smart Service (JSS).

"Ini luar biasa. Artinya terobosan dan inovasi itu kemudian harus dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik," ujar Singgih.

(*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 24 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005